

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden Deng Xiaoping melakukan reformasi ekonomi di Tiongkok dengan tujuan untuk membuka peluang investasi asing, namun hal tersebut berdampak pada kondisi dalam negeri Tiongkok yang mana masyarakatnya justru mengalami tekanan sosial selama bertahun-tahun. Ribuan mahasiswa berkumpul di Lapangan Tiananmen untuk melakukan aksi protes damai yang menuntut pemerintah tentang pentingnya demokrasi dan perbaikan dari korupsi yang terjadi akibat dari program reformasi oleh pemerintah (Stavis, 1990, hal. 53). Pemerintah merespon tindakan demonstrasi mahasiswa tersebut dengan menerapkan status darurat militer pada 20 Mei 1989 di seluruh daratan Tiongkok dengan alasan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Tentara Tiongkok melakukan pengepungan terhadap barikade para demonstran untuk menjalankan mandat dari pemerintah dalam melakukan pembantaian terhadap demonstran di Lapangan Tiananmen pada tanggal 4 Juni 1989 (CNN Library, 2018).

Akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok tersebut, banyak negara di dunia yang merespon nya dengan melakukan berbagai kebijakan, dan juga pemutusan hubungan diplomatik seperti sanksi militer dan sanksi ekonomi. Pemerintah Amerika Serikat merespon dengan menetapkan sanksi ekonomi seperti penangguhan semua jenis penjualan atau ekspor senjata pada 5 Juli 1989, dan dengan pengaruh yang dimilikinya *World Bank* serta *Asian Development Bank* menghentikan seluruh pinjaman kepada Tiongkok (Harding, 1990). Negara-negara anggota Uni Eropa atau yang pada masa itu masih bernama

Masyarakat Eropa (EC) merupakan aktor yang ikut mengutuk perbuatan Tiongkok dengan memberlakukan embargo senjata kepada Tiongkok. Isi yang dimaksud dalam embargo senjata kepada Tiongkok ini dikhususkan ke dalam ekspor barang strategis dan teknologi. Embargo senjata terhadap Tiongkok ini disahkan secara hukum oleh *European Council of Minister* (Dewan Menteri Eropa) pada 26 Juni 1989 di Madrid (SIPRI, 2012).

Uni Eropa mengharuskan negara-negara anggotanya untuk ikut menerapkan embargo, namun ketentuan hukumnya dapat disesuaikan dengan hubungan politik dan militer karena sifatnya yang tidak mengikat. Parlemen Uni Eropa menentukan standar untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Tiongkok yang di atur dalam *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) yang berisi *EU Code* (kode etik) tentang mekanisme ekspor senjata dan *The Dual Use Regulations* (peraturan penggunaan ganda) (Gupta, 2013, hal. 582). Dibawah CFSP kedua peraturan ini mengalami perubahan pada tahun 2000, untuk *The Dual Use Regulations* atau peraturan penggunaan ganda mengalami perubahan menjadi peraturan yang dikhususkan untuk mengatur ekspor teknologi militer dari UE. Sedangkan *EU Code* atau kode etik Eropa berubah namanya menjadi *Common Position* pada tahun 2008 yang berfokus untuk menyelaraskan kebijakan kontrol ekspor oleh Uni Eropa yang sebelumnya sudah diadopsi oleh Dewan Eropa sejak tahun 1998 (Kouchner, 2008, hal. 2).

Ditetapkannya embargo senjata oleh Uni Eropa terhadap Tiongkok tidak menghentikan hubungan bilateral atau kerjasama antara negara anggota Uni Eropa di bidang lain. Karena secara umum embargo senjata Uni Eropa terhadap Tiongkok bukanlah suatu ketetapan yang mutlak terhadap pemutusan hubungan

diplomatik, melainkan sebagai pesan kuat tentang nilai-nilai Eropa yang tidak setuju terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tiongkok (Weitz, 2012). Negara anggota Uni Eropa seperti Perancis atau Inggris memiliki hubungan ekonomi yang dekat sehingga isu embargo senjata bukan merupakan hambatan bagi Tiongkok untuk tetap masuk ke pasar Eropa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris menjadikan Tiongkok sebagai pasar untuk menjual industri pertahanannya (Scimia, 2017). Salah satu alasan kuat yang membuat embargo senjata masih diberlakukan oleh Uni Eropa adalah pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok serta tekanan dari Amerika Serikat serta Jepang. Swedia dan Denmark merupakan negara yang setuju dengan pendapat Parlemen Eropa bahwa Tiongkok masih memiliki bukti yang lemah dalam menunjukkan kemajuan catatan hak asasi manusianya (Casarini, 2007, hal. 375).

Di awal tahun 2005, rencana pengangkatan embargo senjata mendapatkan persetujuan dari parlemen Eropa yang menjabat kala itu yaitu Jack Straw dari Luxembourg yang menggunakan alasan Perancis serta Jerman yang sudah mengusulkan hal ini setahun belakangan. Keputusan ini diikuti dengan pernyataan bahwa Tiongkok sudah meningkatkan perhatian hak asasi manusianya serta memanfaatkan kode etik yang dirasa sudah cukup membatasi ekspor senjata dari Uni Eropa terhadap Tiongkok tanpa harus embargo ini dipertahankan (Agencies, 2005). Usulan ini akhirnya diundur setelah terjadi perselisihan antara Tiongkok dengan Taiwan di bulan April 2005 beberapa bulan setelah pertemuan dilakukan. Hal ini juga di sertai dengan kekhawatiran Parlemen Uni Eropa melalui catatan hak asasi manusia Tiongkok yang masih diragukan (Gow, 2005).

Isu tentang pengangkatan embargo oleh Uni Eropa memberikan dampak yang berbeda bagi hubungan transatlantik yang dimiliki Uni Eropa dengan sekutu di dalamnya yaitu Amerika Serikat. Kedua aktor ini memiliki kekhawatiran tentang orientasi hubungan pertahanan di Transatlantik yang dapat memburuk ketika embargo senjata ini pada akhirnya diangkat (Archick, Grimmet, & Kan, 2005, hal. 29). Peran Tiongkok yang besar di Asia Timur tidak dapat menjadi tolak ukur bagi Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam isu keamanan, karena keduanya memiliki perbedaan dalam hal kepentingan dan kebijakan di Tiongkok. Melihat dari perkembangan militer dan pertahanan di Tiongkok yang terus berkembang Amerika Serikat memiliki kecenderungan untuk menganggapnya sebagai ancaman. Sedangkan Uni Eropa dampaknya justru lebih baik untuk pasar industri pertahanannya, dimana posisi embargo merupakan sebuah aturan yang membatasi beberapa komponen senjata bukan untuk membatasi penjualan senjata antara Uni Eropa dan Tiongkok. Uni Eropa dan Amerika Serikat akan menciptakan krisis dalam menciptakan sebuah kebijakan terhadap isu yang sama untuk Tiongkok karena pengaruhnya akan berdampak pada hubungan Transatlantik (Zaborowski, 2008, hal. 4).

Mitra kerjasama transatlantik merupakan hubungan pertahanan yang dijalin oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa merujuk pada sebuah sistem yang membangun nilai-nilai kerjasama keamanan kawasan. Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai aktor yang terlibat di dalam kerangka kerjasama keamanan di Transatlantik saling memberikan perannya untuk membangun tatanan global dengan landasan demokrasi liberal di daratan Eropa. Dalam perkembangannya hubungan Transatlantik mencakup ke dalam sebuah kepentingan, identitas, dan

juga rasa saling kebergantungan dalam hal keamanan melalui di bentuknya NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) sebagai komunitas keamanan kolektifnya (Alcaro, Peterson, & Greco, 2016, hal. 4). Melalui NATO yang didirikan pada tahun 1949 Amerika Serikat dapat menyebarkan pengaruhnya untuk mencegah ekspansi komunis di wilayah Eropa Barat. Tujuan dari di bangunnya hubungan Transatlantik ini adalah perlindungan dari Amerika Serikat dalam hal keamanan di Eropa, begitu pula Amerika Serikat dapat memastikan dominasi wilayah lautan untuk kepentingan keamanannya sekaligus mempertahankan kestabilan Eropa (Techau, 2018).

Dalam hal ini komunitas Transatlantik harus bertahan sebagai substansi politik dan keamanan yang menghadapi berbagai krisis dari dalam tubuh Amerika Serikat maupun Uni Eropa sendiri. Sebagai sebuah acuan dalam pembuatan kebijakan luar negerinya, komunitas Transatlantik harus bisa mempertahankan nilai-nilainya dalam menghadapi krisis di dunia internasional melalui prinsip-prinsip kebersamaan (Howorth, 2017, hal. 457).

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan satu pernyataan yang akan menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : *Bagaimana dampak rencana pencabutan embargo senjata Uni Eropa atas Tiongkok terhadap masa depan hubungan Transatlantik Amerika Serikat dan Uni Eropa?*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk :

1. Untuk mengetahui dampak diberlakukannya embargo senjata Uni Eropa atas Tiongkok terhadap hubungan Transatlantik Amerika Serikat dan Uni Eropa
2. Mengidentifikasi dampak yang akan terjadi terhadap masa depan keputusan kebijakan embargo senjata di aliansi Transatlantik

1.4 Signifikansi

Kebijakan embargo senjata oleh Uni Eropa terhadap Tiongkok dapat dilihat sebagai bentuk peringatan resmi yang sangat menentang perilaku Tiongkok terhadap pelanggaran hak asasi manusianya di tahun 1989. Namun sudah lama sejak pembahasan tentang embargo ini akan diangkat belum ada perkembangan lebih jauh tentang upaya pengangkatan embargo ini. Melihat dari posisi Tiongkok dengan perekonomian yang terus berkembang di tingkat global, keputusan Uni Eropa untuk mengangkat embargo terhalang oleh izin dari Amerika Serikat yang keduanya berada dalam satu lingkup hubungan transatlantik. Dalam thesis yang di tulis oleh Laos (2014) memberikan gambaran bagaimana aliansi politik serta resiko politik yang akan mempengaruhi proses pengangkatan embargo senjata ini. Namun tidak terdapat penjelasan bagaimana peran Amerika Serikat pada dasarnya merujuk pada kelangsungan hubungan transatlantik dengan Uni Eropa, yang dapat terkena dampaknya ketika embargo senjata diangkat. Penelitian ini lebih fokus terhadap keamanan manusia dan hubungan ekonomi yang terpengaruh akibat konflik antara Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap isu pengangkatan embargo terhadap Tiongkok (Laos, 2014).

Dialog tentang diangkatnya embargo senjata oleh Uni Eropa pada tahun 2005 menghasilkan kegagalan karena bukti tentang peningkatan hak asasi manusia di Tiongkok masih kurang. Selain itu sikap Tiongkok yang mengeluarkan *Anti-Secession Law* kepada Taiwan menjadi alasan lain bagi parlemen Eropa mengundurkan niatnya untuk mencabut kebijakan embargo ini. Terdapat pro dan kontra dari para negara anggota Uni Eropa dengan pilihan untuk mendukung atau justru menolak untuk embargo ini di cabut. Dalam tulisan Ning (2009) menjelaskan adanya bentrokan kepentingan antara aktor domestik atau negara anggota Uni Eropa dan lembaga Uni Eropa terkait keputusan embargo. Namun tidak di jelaskan bahwa larangan yang diserukan oleh Amerika Serikat merupakan sebuah aksi protes karena bentrokan kepentingan yang terjadi justru memicu krisis dalam sektor keamanan Uni Eropa (Ning, 2009).

Penelitian ini kemudian akan menjelaskan tentang dampak yang dapat terjadi di masa depan dalam lingkup hubungan transatlantik apabila kebijakan embargo senjata jadi untuk diangkat. Dengan posisi Amerika Serikat di aliansi Transatlantik yang mendukung Uni Eropa untuk mempertahankan embargonya, maka keputusan tentang perubahan dari kebijakan embargo senjata akan berdampak pada hubungan Transatlantik. Selain itu dalam penelitian ini juga akan membahas tentang krisis yang dihadapi oleh aktor di aliansi transatlantik akibat dari permasalahan embargo senjata terhadap Tiongkok ini. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap pertumbuhan Tiongkok yang semakin maju terutama di bidang pertahanan menghimbau Uni Eropa agar tidak merubah komitmennya di aliansi seperti pencabutan kebijakan embargo. Penelitian ini berfokus pada pembahasan politik keamanan dari kasus kebijakan embargo senjata yang kemudian

berpengaruh di aliansi Transatlantik yang mana dapat dijadikan sebagai fokus pembelajaran yang baik dalam HI.

1.5 Cakupan Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah dampak dari pengambilan keputusan terhadap kebijakan embargo senjata Uni Eropa atas Tiongkok terhadap masa depan hubungan Transatlantik. Di dalam hubungan Transatlantik ini terdapat Uni Eropa dan Amerika Serikat yang memiliki perbedaan pendapat tentang kelangsungan kebijakan embargo senjata kedepannya. Penulis akan melakukan penelitian terhadap dampak yang akan terjadi di masa depan terhadap pengambilan keputusan tentang kelangsungan kebijakan embargo Uni Eropa ini. Isu tentang diangkatnya embargo senjata ini pernah disampaikan oleh Parlemen Uni Eropa dalam pertemuan di Brussels tahun 2005 yang diajukan oleh perwakilan dari Luxemburg setelah Tiongkok dan beberapa negara anggota Uni Eropa mengusulkan untuk penjabutan embargo (China Daily News, 2005). Penelitian ini akan mengidentifikasi pilihan yang akan diambil oleh Uni Eeopa terhadap masa depan kebijakan embargo senjatanya, karena memiliki pengaruh di aliansi Transatlantik dengan Amerika Serikat. Uni Eropa akan mempertimbangkan pengambilan kebijakan terhadap kelangsungan embargo senjata yang akan disesuaikan dengan hubungan yang dimilikinya di aliansi Transatlantik.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam *literature review* ini, penulis akan membagi dua pembahasan utama yaitu mengenai pengaruh kebijakan embargo senjata Uni Eropa atas Tiongkok terhadap Uni Eropa di aliansi Transatlantik. Yang kedua adalah masa depan dari kelangsungan kebijakan embargo senjata Uni Eropa atas Tiongkok dan hubungannya di aliansi Transatlantik.

Pada pembahasan mengenai pengaruh embargo senjata Uni Eropa atas Tiongkok terhadap kebijakan luar negeri negara-negara anggota Uni Eropa, terdapat beberapa tulisan yang berpendapat bahwa hubungan antara Parlemen Nasional Uni Eropa dengan Parlemen Uni Eropa tidak seimbang. Dorongan dari kepentingan masing-masing negara menjadi faktor dari keberhasilan kebijakan di level Uni Eropa, namun kemungkinan untuk isu kebijakan dan keamanan yang seimbang kemungkinannya sedikit. Pada jurnal Kranz (2016, 1-28) berpendapat bahwa keberhasilan kebijakan multilateral dipengaruhi oleh kebijakan konsensus dan implementasi nasional, khususnya norma ekspor senjata yang bentuknya harus lebih fleksibel agar embargo dapat dengan mudah di terapkan di tingkat nasional. Seperangkat norma yang sama akan mencapai kesepakatan dan kebijakan tentang embargo sebagai aturan yang komprehensif sehingga kelembagaan di Uni Eropa tidak akan menimbulkan masalah, di luar dari kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing negara yang membuat pengimplementasiannya terhambat (Kranz, 2016, hal. 2).

Pembahasan kedua adalah mengenai masa depan dari kebijakan embargo senjata yang masih berlaku hingga sekarang bagi hubungan Uni Eropa dengan aliansi dengan Amerika Serikat dalam hubungan transatlantik. Dari segi kebijakan

yang diterapkan setelah tragedi Tiananmen terjadi hingga sekarang, terdapat usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memperbaiki kemitraan yang kemudian mengangkat isu embargo sebagai kebijakan yang sudah usang dan kurang relevan. Dalam jurnal Stumbaum (2007 : 351-370) memperlihatkan Uni Eropa yang berusaha melibatkan Tiongkok sebagai aktor yang dapat membantu meningkatkan kerja sama terutama dalam hal kebijakan keamanan, dengan itu Uni Eropa dapat menuntut peningkatan kerja sama secara konstruktif dan terintegrasi. Namun dialog tentang pencabutan embargo yang mendapatkan respon berbeda dari masing-masing negara anggota Uni Eropa, masih dipertimbangkan kemitraan startegis yang sudah dibuat antara Uni Eropa dan Tiongkok. *The European Union's Common Foreign and Security Policy (CFSP)* dan *European Security and Defence Policy (ESDP)* merupakan serangkaian kebijakan yang dibuat oleh Parlemen Eropa untuk diimplementasikan oleh masing-masing negara anggota Uni Eropa, namun dapat dintepretasikan sesuai kemampuan masing-masing negara terkait dengan kebijakan embargo (Stumbaum, 2007, hal. 353).

Hubungan yang dimiliki antara pencabutan embargo senjata dengan aliansi Uni Eropa di transatlantik sudah dimulai sejak pembentukan kemitraan startegis antara Uni Eropa dengan Tiongkok di tahun 2003. Dalam jurnal Casarini (2013 : 1-4) memaparkan bahwa tujuan yang dimiliki Tiongkok dalam kemitraan strategis tersebut salah satunya adalah untuk bergabung dalam proyek Galileo. Proyek Galileo merupakan sebuah sistem satelit navigasi global yang dipimpin oleh Uni Eropa sehingga Tiongkok bisa menjadi mitra dari negara diluar Uni Eropa yang paling besar. Pendekatan politik ini akan mendorong sebuah diskusi tentang pencabutan embargo karena dalam pengembangan proyek luar angkasa tersebut

akan lebih mudah apabila sifat penggunaan ganda dari teknologi luar angkasa tidak berlaku. Disepakatinya kemitraan strategis pada tahun 2003 ini bertepatan dengan krisis yang sedang berlangsung dalam hubungan Transatlantik karena sikap dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak. Tiongkok bermaksud untuk menggeser posisi Amerika Serikat sebagai sekutu Uni Eropa dan menjadi penggantinya yang mendukung integrasi yang dilakukan oleh Uni Eropa kala itu. Dimulai dari kemitraan strategis yang kemudian terus berlanjut sebagai mitra dalam urusan politik dan militer dari Tiongkok, Uni Eropa kedepannya dapat menjadi aktor yang memfasilitasi dialog maupun mediasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat untuk mewujudkan keamanan global yang lebih terstruktur (Casarini, 2013, hal. 4).

Kebijakan embargo senjata dapat dijadikan sebagai langkah bagi Uni Eropa untuk mengambil bagian dalam zona pertahanan di Asia Timur yang lingkungannya hanya terdiri dari beberapa negara namun kesatuan pertahanannya belum bagus. Hubungan Tiongkok dengan Taiwan, konflik Korea Selatan dan Korea Utara, dan sengketa maritim di Laut China selatan oleh Tiongkok tidak dapat dikondisikan dalam forum regional, karena dalam mekanisme *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang Uni Eropa terlibat di dalamnya hanya membahas mengenai keamanan manusia. Dalam jurnal Putten (2009 : 1-15) menjelaskan bahwa konflik keamanan antara Jepang, Tiongkok dan Amerika Serikat yang terjadi di Asia Timur dapat memengaruhi hubungan Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam hubungan transatlantik atau di dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Namun sebagai aktor yang berperan sebagai perantara dalam dialog keamanan di Asia Timur, Uni Eropa memiliki embargo senjata

sebagai kendala yang juga dapat dijadikan solusi dalam dimensi keamanan di Asia Timur. Peran Amerika yang sangat penting dalam lingkup keamanan Taiwan menjadi sebuah celah yang tidak menguntungkan bagi Uni Eropa dalam memasuki ranah keamanan di Asia Timur. Penolakan yang dikemukakan oleh Amerika Serikat terhadap pencabutan embargo secara tidak langsung akan mengarah kepada peran keamanannya dengan Uni Eropa di hubungan transatlantik (Putten, 2009).

Pandangan akan tindakan embargo sebagai langkah untuk mendiskriminasi antara pemimpin yang bertanggung jawab dan penduduk sipil, dinilai tidak sesuai target dengan beberapa kebijakan sanksi yang dipaparkan dalam jurnal Portela (2016 : 1-19) bahwa terdapat tiga kebijakan sanksi yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur keseimbangan embargo yang berlaku. Pertama, bisa dilihat dari *development aid suspensions* atau penangguhan bantuan pembangunan yang ditargetkan untuk menghukum aparat negara Tiongkok merugikan penduduknya karena tidak memiliki keuntungan dari kolerasi ekonomi yang terjalin. Kedua, sanksi *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* dikatakan kurang mengenai target yang diinginkan untuk di capai dalam praktik dan dampak yang ingin diberikan dari adanya sanksi tersebut. Ketiga, tentang sanksi penangguhan *Generalised Scheme of Preferences (GSP)* yang membahas tentang pemulihan aliran perdagangan namun kerangkanya tidak sesuai dengan penargetan dalam embargo (Portela, 2016, hal. 6).

Analisis dalam mengidentifikasi kelangsungan kebijakan embargo senjata Uni Eropa terhadap Tiongkok dilakukan dengan menggunakan teori *Prospect Theory* dari Kahneman & Tversky dengan judul buku *Prospect Theory : An*

Analysis of Decision under Risk. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pavlovi (2019 : 1-29) tentang isu pemilihan presiden di Yugoslavia dan Serbia yang mengadakan pemilihan presiden lebih awal ketika mereka sedang menjabat, hasil yang didapatkan oleh mereka yaitu kekalahan. Tujuan dari dilakukannya pemilihan presiden lebih awal adalah untuk menghindari kekalahan parlemen yang saat itu masih memiliki suara mayoritas. Dalam analisis kasus ini yang dilakukan menggunakan *prospect theory* memiliki tujuan untuk mempelajari kesalahan yang dapat diprediksi karena presiden masih menjabat di dalam pemerintahan. Namun *prospect theory* menunjukkan cara pembingkaiian masalah oleh presiden untuk mengambil resiko dengan mengadakan pemilihan lebih awal memberikan hasil kekalahan (*loss*) karena kurangnya perhatian yang dimiliki terhadap kondisi perekonomian dalam negerinya (Pavlovic, 2019, hal. 26).

1.7 Landasan Teori/Konsep/Pendekatan

Prospect Theory

Landasan konseptual yang digunakan penulis untuk mendalami kasus ini adalah *Prospect Theory*, yang diterapkan dalam metode penghitungan resiko dari setiap opsi kebijakan. Penggambarannya secara umum bahwa *prospect theory* menggambarkan seseorang atau *decision maker* cenderung menghindari keputusan yang berisiko tinggi (*risk-averse*) ketika dihadapkan dengan potensi mendapatkan keuntungan (*gain*) dan seseorang atau *desicion maker* akan cenderung mengambil keputusan yang berisiko tinggi (*risk-acceptance*) ketika dihadapkan dengan kemungkinan kegagalan (*loss*). *Prospect theory* menggambarkan keadaan seseorang saat *gain* dan *loss* yang akan menghasilkan

sebuah keputusan yang akan diputuskan oleh *decision maker*. Pandangan yang dibangun sebelum sebuah pilihan di buat saling bergantung pada kecenderungan terhadap hasil akhir dari resiko yang diterima.

Prospect theory secara umum merupakan teori yang menggambarkan sebuah pertimbangan dalam keadaan terdesak yang menghasilkan sebuah pengambilan keputusan di dimana terdapat banyak pilihan namun domain yang dimilikinya terlalu kompleks. Dalam buku McDermott (1988) penerapan *prospect theory* di mulai dari pemeriksaan domain yang relevan terhadap pertimbangan kebijakan yang akan diambil, baik domain *gain* dan *loss*. Domain yang digunakan sebagai acuan oleh *decision maker* untuk menentukan keputusannya dalam pengambilan keputusan harus melihat pengaruh yang dimiliki oleh variabel independen. Terdapat dua kriteria yang dapat di analisis melalui opsi domain sebagai langkah perhitungan dalam memilih kebijakan yang akan menggambarkan keadaan saat itu yaitu kriteria subjektif dan kriteria objektif. Dengan menggunakan variabel independen maka posisi *gain* atau *loss* dapat dibuat melalui penggunaan kriteria objektif dan kriteria subjektif di dalam suatu penelitian. Pemilihan opsi domain disebut sebagai pemingkakan permasalahan yang dihadapi oleh *decision maker* dimana kemudian diikuti oleh evaluasi terhadap resiko yang didapatkan dalam memutuskan kebijakan luar negeri (McDermott, 1998, hal. 44-45).

Kriteria objektif merupakan sudut pandang yang diambil dari media cetak maupun elektronik dan juga data yang diperoleh dari survey yang berisi tentang persepsi dari masyarakat atau aktor yang bersangkutan tentang isu yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan oleh *desicion maker*. Sedangkan untuk kriteria

subjektif merupakan sudut pandang dari tulisan atau hasil karya dan bisa juga dalam bentuk pidato yang berisi tentang persepsi yang dimiliki oleh *decision maker* sendiri.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data yang berbentuk deskriptif. Metode yang digunakan dalam menganalisis studi kasusnya adalah melalui teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Pengertian dari metode penelitian kualitatif merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dianalisis dengan menginterpretasikan hasil dari penelitian yang berbentuk deskriptif (Anggito & Setiawan, 2018). Penggunaan metode kualitatif akan menghasilkan data dalam bentuk deskriptif terhadap kasus yang diteliti. Metode penelitian kualitatif dirasa tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini karena penelitian analisis yang dilakukan berdasarkan pada analisis kasus dengan menggunakan teori.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Uni Eropa, penulis melihat potensi yang berkembang antara Uni Eropa dengan Tiongkok yang dapat memengaruhi kebijakan embargo senjatanya di masa depan. Sebagai aktor utama yang memiliki wewenang terhadap embargo senjata yang ditetapkan kepada Tiongkok, relasi yang dimiliki Uni Eropa di aliansi Transatlantik menghasilkan

satu pemahaman mengenai bagaimana relevansi kebijakan embargo senjata Uni Eropa atas Tiongkok terhadap hubungan diplomatik kedua belah pihak.

1.8.3 Teknik Pengumpul Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan *library research* atau metode studi pustaka. Cara yang dilakukan dalam pengambilan data diawali dengan pencarian informasi dari sumber-sumber yang terpercaya seperti buku, jurnal ilmiah, pendapat dari para ahli, laporan dari pertemuan tingkat tinggi, maupun analisis kasus dan berita. Data yang didapatkan kemudian dapat dijadikan sebuah materi untuk menganalisis kasus karena memiliki dasar yang kuat dalam menjabarkan penelitian yang dilakukan.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, penulis akan memulai melakukan analisis kasus dengan mencatat hasil data yang ditemukan melalui proses pengambilan data. Setelah itu penulis memilah data-data yang sesuai dengan penjabaran studi kasus untuk diklasifikasi menjadi alur pengolahan data yang runtut. Dalam memasukkan data saat pengerjaan, penulis akan menyertakan sumber dari pengambilan data yang dimasukkan ke dalam penjabaran penelitian. Data-data tersebut akan dihubungkan agar bisa dilakukan analisis terhadap temuan data dan hipotesis dalam penelitian.